

# EFEKTIVITAS KOORDINASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Annisa Nurul Nafilah Palenga<sup>1</sup>, Irfan Setiawan, S.IP, M.Si<sup>2</sup>  
NPP. 31.0854

Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi tengah  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: [annisanurulnp@gmail.com](mailto:annisanurulnp@gmail.com)

Email: [irfansetiawan@ipdn.ac.id](mailto:irfansetiawan@ipdn.ac.id)

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** In implementing the principles of Good Governance, regional heads are required to carry out reports on regional government management or what is called a Regional Government Implementation Report. The Central Sulawesi Provincial Government, in this case the Governance Section together with the LPPD drafting team, formulates and compiles LPPD data. In the preparation process, there were problems faced by the drafting team, such as the lack of innovation that made it easier to collect the required data, lack of understanding and lack of discipline in timeliness in data collection. **Objective:** This research aims to find out and describe the effectiveness of the governance department in coordinating the preparation of reports. regional government administration (LPPD) in Central Sulawesi Province. Preparation of LPPD, what efforts have been made by the governance department to realize the effectiveness of the governance department in coordination. Preparation of regional government administration reports (LPPD) in Central Sulawesi Province. **Method:** The research uses a qualitative-descriptive research method with an inductive approach. Data collection methods are observation, interviews and documentation. Data analysis technique with 3 stages, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** Coordination of the Governance section in the preparation of the LPPD, between the Governance Section and Regional Apparatus has been running effectively based on 4 (four) criteria, namely input, process, results and productivity. There are efforts to realize the effectiveness of the Governance Section in coordinating the preparation of Central Sulawesi Province Regional Government Implementation Reports (LPPD) by holding workshops and always coordinating with the relevant OPD. **Conclusion:** Coordination in the preparation of the LPPD by the Governance section has been effective.

**Keywords:** *Effectiveness, Coordination, Regional Government Implementation Report*

### **ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** Dalam menjalankan prinsip Good Governance Kepala daerah diwajibkan melakukan pelaporan pengurusan pemerintahan daerah atau yang disebut dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan bersama tim penyusun LPPD merumuskan dan menyusun data LPPD. Dalam proses penyusunan, terdapat permasalahan yang dihadapi tim penyusun seperti belum adanya inovasi yang memudahkan pengumpulan data yang dibutuhkan, kurangnya pemahaman dan belum disiplinnya ketepatan waktu dalam pengumpulan data. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas bagian tata pemerintahan dalam koordinasi Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) di Provinsi Sulawesi Tengah Penyusunan lppd, bagaimana upaya yang dilakukan bagian tata pemerintahan dalam mewujudkan efektivitas bagian tata pemerintahan dalam koordinasi Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di Provinsi Sulawesi Tengah. **Metode:** Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Koordinasi bagian Tata Pemerintahan dalam Penyusunan LPPD, antara Bagian Tata Pemerintahan dengan Perangkat Daerah telah berjalan dengan efektif berdasar pada 4(empat) kriteria yaitu input, proses, hasil, dan produktivitas. Adapun upaya untuk mewujudkan Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan Dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Penyusunan LPPD dengan mengadakan workshop serta selalu berkoordinasi dengan OPD terkait. **Kesimpulan:** Koordinasi dalam penyusunan LPPD oleh bagian Tata Pemerintahan telah berjalan secara efektif. **Kata Kunci :** Efektivitas, Koordinasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaran pemerintah daerah dituntut harus mampu memajukan dan mensejahterakan daerahnya dengan meningkatkan pemberdayaan, pelayanan, dan antusias dari penduduk yang ada di daerahnya masing-masing dengan berpacuan atau berpedoman pada asas pengelolaan pemerintah negara yang meliputi tertib administrasi, kepentingan umum, akidah, profesionalisme, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, tanggung jawab, dan ketidak berpihakkan. Sedangkan asas otonomi yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan kompetitivitas tiap-tiap wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, dan karakteristik serta ragam potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah juga diharapkan dapat merawat warisan budaya khas suatu wilayah, sambil tetap mempertahankan prinsip kesatuan dalam konteks negara.

Dengan adanya hal ini otonomi daerah diharapkan bisa mengembangkan kemampuan bersaing tiap tiap daerah dengan perhatian pertama yaitu demokrasi, keistimewaan, pemerataan, kekhususan serta potensi daerah dalam sistem NKRI untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme, akuntabel, serta dapat menjawab tuntutan dari perubahan dengan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip Good Governance, bahwa kepala daerah harus melakukan pelaporan pengurusan pemerintahan daerah atau biasa disebut dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah dalam hal ini yaitu kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Selama satu tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah berkewajiban membuat laporan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dimana laporan tersebut memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan.. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah diharuskan untuk menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk menjalankan kewajiban hukum yang dimaksud, pada akhir tahun anggaran harus Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menjelaskan kemajuan pengaktualan Pembangunan dan juga memuat capaian kinerja penyelenggaraan daerah dan tugas pembantuan. LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan di gunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan hierarkis antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga aktivitas pemerintahan daerah selalu terintegrasi dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pusat secara keseluruhan. Demi mendukung keberhasilan dalam Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui Keputusan

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 100.1.7/04.3/RO. PEMOTDA.G.ST/2023 tentang Tim Penyusun Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Sulawesi Tengah. Berikut data tim penyusun Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah .

**Tabel 1.1**

**Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Biro Pemerintahan	Sekretaris
3.	Dody Setiawan,S.STP.,M.A.P	Anggota
4.	Mappatoba Andi,S.H.,M.Eng	Anggota
5.	Dian Agusti, S.P.,M.P	Anggota
6.	Hasnah Elam,S.sos.,M.A.P	Anggota
7.	Dina Mariany Mustaqim,S.STP.,M.SI	Anggota

*Sumber : Bagian Tata Pemerintahan*

Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pihak yang bertanggungjawab menyusun LPPD masih menggunakan metode konvensional dengan menghasilkan dokumen cetak seperti print out atau salinan fisik yang dapat dilihat atau dipegang (hard copy). Untuk memperoleh data atau informasi dari OPD yang akan disusun atau dimuat dalam LPPD, bagian tata pemerintahan melakukan beberapa proses tahapan penyusunan LPPD meliputi tahapan permintaan, pengumpulan, dan pengolahan data, yang memerlukan waktu cukup lama, ditambah lagi saat ini belum terlihat adanya inovasi yang dapat mempermudah proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi hambatan dalam proses penyusunan LPPD oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah keterlambatan pengumpulan data oleh OPD. Bagian Tata Pemerintahan telah menetapkan batas waktu untuk pengumpulan data yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman bagi OPD untuk mengumpulkan data dalam tenggat waktu yang telah ditentukan namun masalah keterlambatan belum mengalami perubahan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tim penyusun dari OPD terkait pentingnya data dan informasi dalam penyusunan LPPD agar hambatan berupa keterlambatan dapat dihindari.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan dalam proses penyusunan LPPD oleh bagian tata pemerintahan yaitu tim penyusun LPPD Provinsi Sulawesi Tengah yaitu belum adanya inovasi pengumpulan data yang memudahkan OPD (organisasi perangkat daerah) dalam pengumpulan data yang dibutuhkan Bagian Tata Pemerintahan. Selanjutnya, belum maksimalnya pengumpulan data karena kurangnya kedisiplinan OPD. Walaupun telah ditentukan tenggat waktu, pengumpulan data seringkali tidak tepat waktu sehingga menyebabkan keterlambatan. Karena hal itu, perlu adanya pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya data informasi dalam penyusunan LPPD agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Dalam konteks ini, akan diuraikan kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

Penelitian Elip Helda, Malik Malik, Ade Thiya Delisa (2020) dengan judul penelitian "Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro" berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam menyusun LPPD pada tahun-tahun terakhir di Kota Metro, yang telah meraih penghargaan kategori terbaik I (2018) dan terbaik II (2017) dari Kementerian Dalam Negeri. Meskipun mengalami hambatan, terutama dalam hal struktur birokrasi dan disposisi. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang sama, yaitu LPPD. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya berfokus pada identifikasi hambatan-hambatan selama proses Penyusunan LPPD, dianalisis dengan landasan teori Implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada efektivitas koordinasi dalam Penyusunan LPPD di Provinsi Sulawesi Tengah. Pendekatan yang digunakan berdasarkan teori yang diajukan oleh Sedarmayanti (2009:60), yang mengartikulasikan elemen-elemen seperti Input, Proses, Hasil, dan Produktivitas dalam koordinasi.

Penelitian Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokot, Fitri H Mamonto (2020) dengan judul penelitian "Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan". Penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana proses LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa serta hambatan yang ditemui dalam Penyusunannya. Permasalahan yang terjadi yaitu keterbatasan data yang sesuai format, kurangnya motivasi dan komitmen pegawai, kompetensi SDM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kinerja. Fokus penelitian adalah mengetahui efektivitas Penyusunan LPPD yang dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985: 53) meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Perbedaan pada lokus dan tahun penelitian yaitu penelitian sebelumnya dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Sulawesi Tengah.

Penelitian Aris Siswadi (2019) dengan judul "Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara oleh Aris Siswadi

2019". Fokus penelitian yaitu Evaluasi Penyusunan LPPD, dengan evaluasi input diperoleh hasil bahwa komitmen pimpinan daerah dinilai kurang maksimal sehingga terjadi duplikasi data yang beragam. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah letak pada objek yang diteliti yaitu LPPD. Perbedaan yaitu pada fokus penelitian terletak pada Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat diukur dengan menggunakan teori William N. Dunn (2012:608). Penelitian oleh Dede Yodi (2020) yang berjudul Efektivitas Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Di Puskesmas Kecamatan Gambir menemukan bahwa koordinasi pelaksanaan tugas di Puskesmas Kecamatan Gambir belum sepenuhnya efektif. Penelitian oleh Hery Simon (2020) yang berjudul Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan menemukan bahwa Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. Penelitian oleh Veneranda Moi (2021) yang berjudul Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan Lppd Biro Pemeritahan Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa kurang optimalnya koordinasi LPPD. Penelitian oleh Nindy Syafrilia, Sri Widayanti (2021) yang berjudul Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta menemukan bahwa enyusunan LPPD di Kota Yogyakarta Tahun 2020 sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan tatakala yang telah ditentukan. Penelitian Citra Ramadhani Ayu Nur Virdanti1, R. Widodo Triputro2 (2022) Yang Berjudul Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 Menemukan Bahwa Adanya komitmen yang baik dari pimpinan Kabupaten Sleman untuk dapat melakukan penyusunan dan pengumpulan buku LPPD secara maksimal dan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya SK Tim Penyusunan LPPD, saran serta perhatian khusus pimpinan yang mau ikut terlibat dalam koordinasi penyusunan LPPD

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian dengan topik yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terkait efektivitas koordinasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) opada bagian Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan dimana penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas yang fokus pada topik yang berbeda yaitu implementasi LPPD maupun evaluasi LPPD.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan dalam Koordinasi Penyusunan Dan Pengumpulan Data LPPD Pada Bagian Tata Pemerintahan Sulawesi Tengah sertaa untuk Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Pengumpulan dan Penyusunan data LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan Sulawesi Tengah.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif

dengan pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2013) bahwa “Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana penulis sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode deskriptif menurut Nurdin & Hartati, (2019) metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya pendekatan induktif dijelaskan oleh (Simangunsong, 2017) merupakan pendekatan dimana setiap fenomena/ gejala mengacu pada keadaan di lapangan sehingga penulis perlu melengkapi diri dengan alat perekam atau sejenisnya.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan observasi langsung pada Bagian Tata Pemerintahan Umum dan beberapa Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Data sekunder berupa dokumentasi, Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2020, aturan perundangan sehubungan dengan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Sumber Informasi (Informan) dalam pelaksanaan Wawancara**

<b>NO</b>	<b>INFORMAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Sekretasi Daerah Propinsi	1
2.	Asisten Daerah	1
3.	DPRD	1
	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1
5	Kasubbag Otonomi Daerah	1
6	Anggota Tim penyusun LPPD Propinsi	3
7	Kasubbag Perencanaan dan Program pada Perangkat Daerah	5

*Sumber : Diolah oleh penulis (2023)*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Wawancara dilakukan bersama informan yang telah ditentukan. Data dianalisis berdasarkan 3 tahap yaitu 1) reduksi data, 2) penyajian data dan 3)

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam membuat atau merumuskan suatu kebijakan, mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan dalam rangka Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hal

tersebut berikut akan diuraikan tugas Sub Bagian Otonomi Daerah Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian
- 2) Menghimpun peraturan perundangan-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian;
- 3) Menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 4) Menghimpun informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 5) Melaksanakan fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
- 6) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 7) Memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 8) Menyusun bahan Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;
- 9) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

### **3.1. Efektivitas**

Dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009) yang mengungkapkan bahwa efektivitas suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu : Input, proses, hasil dan produktivitas

#### **a. Input**

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil yang dapat dilihat Data LPPD. Data Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan data yang diterima dari Perangkat Daerah kemudian data yang diterima divalidasi oleh Bagian Tata Pemerintahan agar tidak terdapat kekurangan/kesalahan dalam pengumpulan data dari Perangkat Daerah yang selanjutnya akan diolah menjadi Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil wawancara Bersama asisten daerah 1 Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan dimensi input pada indikator, bahwa dalam penyusunan LPPD, kualitas data masih bermasalah karena terdapat kesalahan dan kekurangan data yang dimasukkan oleh OPD. Selain itu, adanya keterlambatnya OPD dalam pengumpulan data LPPD

#### **b. Proses**

Dalam proses, terdapat empat indikator yang dapat mempengaruhi hasil dari proses dalam hal ini proses penyusunan LPPD, yaitu

- 1) Sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bagian Otonomi Daerah Pemerintahan terkait dengan dimensi proses pada indikator sumber daya manusia, diketahui bahwa proses penyusunan telah berjalan dengan baik

dikarenakan melibatkan tim penyusun LPPD mempunyai Pendidikan S2 sebanyak 8 orang, dan S1 sebanyak 2 orang, sehingga mampu mengelola penerimaan data yang diberikan oleh beberapa bidang yang ada dan dikelola lalu dikumpulkan ke Bagian Tata Pemerintahan.

2) Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Pemerintahan terkait dengan dimensi Proses pada indikator sarana dan prasarana yang ada di Bagian Tata Pemerintahan sudah cukup lengkap dalam menunjang sub bagian perencanaan dan program mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh Bagian Tata Pemerintahan. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia seperti meja kerja besar, lemari penyimpanan berkas maupun dokumen, kursi, computer, laptop, printer, alat *scan* hingga dispenser.

3) Koordinasi

Koordinasi merupakan proses pengaturan dan integrasi kepentingan bersama guna mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan terkait dengan dimensi Proses pada indikator Koordinasi dinilai berjalan efektif Kepala Bagian Pemerintahan telah menyurat kepada Perangkat daerah dan Perangkat lingkup Sekretariat daerah dan OPD yang dianggap harus mengumpulkan data sesuai dengan data pendukung LPPD Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun data terkait penyampaian berkas oleh OPD untuk penyusunan LPPD tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.1  
Penyampaian Berkas Organisasi Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Tanggal Penyampaian Berkas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pendidikan	Januari	Selesai Maret
2	Dinas Kebudayaan	Januari	Selesai Maret
3	Dinas Kesehatan	Januari	Selesai Februari
4	Dinas Sosial	Januari	Selesai Maret
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Januari	Selesai Januari
6	Dinas Perhubungan	Januari	Selesai Januari
7	Dinas Cipta Karya dan SDA	Januari	Selesai Januari

No	Perangkat Daerah	Tanggal Penyampaian Berkas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	Januari	Selesai Februari
9	Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan	Januari	Selesai Januari
10.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural	Januari	Selesai Maret
11.	Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik	Januari	Selesai Februari
12.	Dinas Kehutanan	Januari	Selesai Maret
13.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Januari	Selesai Januari
14.	Dinas ESDM	Januari	Selesai Februari
15.	Dinas Pemuda & Olahraga	Januari	Selesai Februari
16	Dinas Pariwisata	Januari	Selesai Februari
17.	Dinas Perindag	Januari	Selesai Januari
18.	Dinas Koperasi & UMKM	Januari	Selesai Januari
19.	Dinas Perkebunan & Peternakan	Januari	Selesai Januari
20.	Dinas Lingkungan Hidup	Januari	Selesai Januari
21.	Dinas Penanam Modal & PTSP	Januari	Selesai Maret
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Januari	Selesai Januari
23.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Januari	Selesai Januari
24.	Prov. SULTENG	Januari	Selesai Januari
25.	INSPEKTORAT DAERAH	Januari	Selesai Februari

No	Perangkat Daerah	Tanggal Penyampaian Berkas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	BAPPEDA	Januari	Selesai Februari
27.	Badan Pendapatan Daerah	Januari	Selesai Januari
28.	Badan Riset Inovasi	Januari	Selesai Februari
29.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Januari	Selesai Januari
30.	Badan BAKESBANGPOL	Januari	Selesai Januari
31.	Badan Kepegawaian	Januari	Selesai Februari
32.	Badan Pengembangan SDM	Januari	Selesai Maret
33.	Badan Pengelola Keuangan & Asset	Januari	Selesai Januari
34.	BPBD	Januari	Selesai Maret
35.	SATUAN POL PP	Januari	Selesai Maret
36.	RSUD UNDATA	Januari	Selesai Maret
37.	Sekretariat DPRD	Januari	Selesai Maret
38.	Biro Pemerintahan dan OTDA Setda	Januari	Selesai Maret
39.	Biro Administrasi Pembangunan	Januari	Selesai Januari
40.	Biro Kesejahteraan Rakyat	Januari	Selesai Maret
41.	Biro Perekonomian	Januari	Selesai Maret
42.	Biro Hukum	Januari	Selesai Februari
43.	Biro Administrasi Pimpinan	Januari	Selesai Februari
44.	Biro Organisasi	Januari	Selesai Januari
45.	Biro Umum	Januari	Selesai Januari
46.	Biro Pengadaan, Barang, dan Jasa	Januari	Selesai Januari
47.	RSU. Madani	Januari	Selesai Maret
48.	Badan Penghubung	Januari	Selesai Maret

Pengumpulan data-data yang diperlukan telah menyurat ke Perangkat daerah terkait, Bagian Tata Pemerintahan juga melakukan Penyampaian Khusus Kepada OPD-OPD terkait Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan Perangkat Daerah khususnya Sub Bagian Perencanaan dan program tentang pentingnya LPPD. Hal ini menandakan bahwa proses koordinasi berjalan dengan baik.

#### 4) Pengawasan

Secara umum, fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya kejadian, seringkali disebut juga sebagai tindakan pencegahan atau berjaga-jaga. Sementara itu, fungsi represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kejadian, juga dikenal sebagai tindakan langsung. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan terkait dengan dimensi Proses pada indikator pengawasan. Kepala Biro Pemerintahan mengawasi mulai dari tingkat bawah yaitu tim penyusun lalu mengecek Perangkat Daerah yang mengumpulkan data LPPD agar tidak terjadi kesalahan serta ketepatan waktu OPD dalam pengumpulan data. Selain itu, Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Daerah terkait dengan dimensi proses pada indikator pengawasan, Sub bagian Pemerintahan daerah melakukan pengecekan/penelahan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan oleh Perangkat Daerah serta Sub Bagian Pemerintahan Daerah turun langsung ke Perangkat Daerah yang terlambat dalam memasukkan data pada Bagian Tata Pemerintahan. Pengawasan dilakukan dengan memonitor dan mengawasi proses tersebut dari tim penyusun, OPD, hingga bagian tata pemerintahan. Bagian Tata Pemerintahan juga melakukan inspeksi langsung ke Perangkat Daerah yang belum mengirimkan data kepada Bagian Tata Pemerintahan.

#### c. Hasil

Kriteria hasil diukur berdasarkan kualitas data dan evaluasi. Data quality atau kualitas data merujuk pada upaya pengembangan dan implementasi kegiatan yang menggunakan teknik manajemen kualitas pada data. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan terkait dengan dimensi Hasil pada indikator kualitas data. Penyusunan LPPD tim penyusun mengedepankan transparansi, akuntabel, akurasi, dan objektivitas serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi.

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang direncanakan untuk mengukur, menilai, dan menilai keberhasilan atau efektivitas suatu program. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan terkait dengan dimensi hasil pada indikator evaluasi, Hasil dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ELPPD) digunakan sebagai pembinaan lebih lanjut terhadap Pemerintah daerah agar lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepannya. evaluasi LPPD yang dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan sudah baik dan sesuai pedoman yang ada. Evaluasi hasil Penyusunan LPPD dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi.

#### **d. Produktivitas**

Produktivitas sebagai kriteria dari efektivitas suatu program atau kegiatan dapat diukur dari motivasi dan pendidikan. Motivasi menjadi landasan dari konsep motivasi, yang menggambarkan sebagai kekuatan penggerak yang telah aktif. Dengan demikian, motivasi dapat dijelaskan sebagai segala sesuatu yang menjadi pendorong perilaku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Berdasarkan wawancara dengan Asisten Daerah 1 terkait dengan dimensi Produktivitas pada indikator motivasi, sebagai pimpinan pada Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan motivasi seperti mendengarkan apa keluhan bawahan dan dapat menghargai ide dan pendapat dari bawahan. Serta mendengarkan masalah yang dihadapi dalam pengumpulan dan Penyusunan LPPD serta memberikan saran dan kebijakan.

Tujuan pendidikan adalah menghasilkan individu yang berkualitas dan berintegritas, yang memiliki visi yang luas untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif di berbagai situasi. Pendidikan memiliki peran penting dalam memotivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas hidup dalam semua aspeknya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan terkait dengan dimensi Produktivitas pada indikator pendidikan, tim penyusun LPPD bekerja sesuai bidangnya masing-masing, pada Bagian Tata Pemerintahan Penyusunan LPPD ini telah dilakukan setiap tahun sehingga tim penyusun dianggap telah berpengalaman dalam Penyusunan LPPD. Jadi, motivasi yang diberikan pimpinan kepada tim penyusun LPPD berbentuk saling menghargai dan saling mengapresiasi kerja tim. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tim penyusun LPPD sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

#### **3.2. Upaya yang Dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk Mewujudkan Efektivitas Koordinasi dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah**

Upaya merupakan aktivitas yang melibatkan penggunaan tubuh, tenaga, dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Ini merupakan tindakan atau inisiatif yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan sekretariat daerah untuk mewujudkan efektivitas Bagian Tata Pemerintahan dengan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Provinsi Sulawesi Tengah koordinasi dan transparansi. organisasi yang baik memiliki sistem koordinasi yang efektif, yang didukung oleh kerjasama yang kuat antar bagian. Koordinasi memegang peranan penting dalam mengatur berbagai kegiatan yang berbeda yang dilakukan oleh berbagai individu atau bagian dalam organisasi. Selain itu, diperlukan peningkatan transparansi dalam menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Dan juga selalu melaporkan kendala dan hasil dalam Penyusunan LPPD kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa efektivitas Bagian Tata pemerintahan dalam koordinasi Penyusunan LPPD pada memiliki dampak besar terhadap Penyusunan LPPD yang baik, lengkap serta sesuai dengan prosedur

Penyusunan LPPD. Koordinasi yang baik dengan setiap OPD yang ada di Wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah akan mempermudah pengumpulan LPPD yang cermat sesuai SOP serta mempermudah Penyusunan LPPD dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Rosmiyanah, Mareta dan Elip yang sama dalam membahas mengenai Penyusunan LPPD. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan koordinasi merupakan salah satu item penting yang sangat berguna bagi Penyusunan LPPD, tanpa koordinasi yang baik maka pengumpulan serta Penyusunan LPPD akan mengalami kendala dan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan keefektivitasan koordinasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan diatas, hal tersebut juga sesuai dengan teori yang digunakan penulis yaitu teori (Sedarmayanti, 2009). Dimana efektivitas dapat diukur dengan beberapa kriteria yaitu input, proses, hasil dan produktivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator input, proses, hasil dan produktivitas, sehingga pelaksanaan koordinasi dalam Penyusunan LPPD sudah sesuai dengan teori. Hasil penelitian tersebut menjawab kebenaran dari teori sedarmayanti tersebut dan menunjukkan bahwa koordinasi memang adalah elemen penting yang efektif dan berpengaruh terhadap keberhasilan Penyusunan dan pengumpulan LPPD di Provinsi Sulawesi Tengah.

Efektivitas koordinasi Penyusunan LPPD didasari oleh Peraturan pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan LPPD sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan tersebut. Menteri. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 pada pasal 1 menjelaskan tentang pengertian LPPD ialah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Berdasarkan hasil analisis penulis, hasil dari koordinasi dalam Penyusunan LPPD menghasilkan terwujudnya LPPD yang sesuai ketentuan memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Koordinasi telah berjalan sesuai dengan regulasi tersebut dimana berdasarkan hasil penelitian bagian tata pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah sudah melakukan ketentuan regulasi Terkait Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti pembentukan tim penyusun dan tim pereviu, pengumpulan data dan dokumen pendukung, Penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam Penyusunan LPPD, melakukan Penyusunan rancangan LPPD serta menetapkan dokumen LPPD.

### **3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui terdapat beberapa hambatan dalam penyusunan LPPD oleh tim penyusun pada bagian Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi

Tengah. Sama halnya dengan temuan pada penelitian dilakukan oleh Elip Helda, Malik Malik, Ade Thiya Delisa ini pada 2020, dengan judul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro menunjukkan hasil yang relevan dengan hasil penelitian penulis dimana pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa faktor penghambat utama dalam Penyusunan LPPD ialah pada faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi, walaupun pada fokus berbeda namun hambatan yang terjadi pada Penyusunan LPPD relevan dengan hasil penelitian penulis dimana struktur birokrasi yang rumit menjadikan Penyusunan menjadi semakin sistematis, sehingga dalam pengumpulan maupun Penyusunan membutuhkan proses yang lama, koordinasi dalam hal ini sangat diperlukan, begitu pula dengan faktor disposisi, disposisi yang berlebihan sangat menghambat proses Penyusunan LPPD..

Pada temuan atau hasil penelitian, diketahui bahwa koordinasi adalah faktor penting untuk mengatasi permasalahan yang menjadi penghambat dalam penyusunan LPPD. Perlu adanya peningkatan koordinasi antara bagian Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dengan OPD secara berkala agar data dapat dikumpulkan secara tepat waktu. Koordinasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penyusunan termasuk pengumpulan data LPPD. Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya yaitu oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokot, Fitri H Mamonto pada 2020, dengan judul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, memiliki fokus bagaimana proses LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa serta hambatan yang ditemui dalam Penyusunannya. Penelitian tersebut relevan dan sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan, dimana dalam proses LPPD tersebut faktor koordinasi menjadi elemen yang penting. Dengan koordinasi yang baik maka proses pengumpulan dan Penyusunan LPPD akan menjadi lebih cepat dan mudah untuk dilaksanakan.

### **3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)**

Hasil penelitian penulis menunjukkan adanya keefektifan bagian tata pemerintahan dalam koordinasi Penyusunan LPPD menunjukkan baiknya pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu tersebut.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aris Siswadi pada Tahun 2019, dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, fokus dari penelitian tersebut adalah Evaluasi Penyusunan LPPD, dengan evaluasi input diperoleh hasil bahwa komitmen pimpinan daerah dinilai belum maksimal sehingga terjadi duplikasi data yang beragam.

Fokus tersebut relevan dengan hasil penelitian penulis, dimana Penyusunan LPPD di Provinsi Sulawesi Tengah berjalan baik karena koordinasi berjalan dengan efektif, koordinasi tersebut menunjukkan adanya hubungan dan komitmen yang baik dari pimpinan maupun tiap – tiap OPD juga tim penyusun. Hasil penelitian penulis relevan dengan fokus penulis. Hasil dari penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa komitmen pimpinan daerah dinilai belum maksimal sehingga terjadi duplikasi data yang beragam menunjukkan bahwa koordinasi di pemerintah provinsi Kalimantan Utara belum berjalan dengan baik. Jika hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa Penyusunan dan elemen input, proses, hasil, output dan produktivitas berjalan dengan baik maka komitmen dari kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tengah sudah maksimal.

#### IV. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Efektivitas Koordinasi Dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi Bagian Tata pemerintahan dalam Penyusunan LPPD sudah berjalan efektif, dapat dilihat dari empat kriteria sebagai berikut :
  - Input dapat disimpulkan bahwa untuk indikator input diperoleh data LPPD masih belum maksimal karena masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Proses dapat disimpulkan berjalan dengan lancar. Indikator hasil dengan sub indikatornya yaitu kualitas data LPPD yang dihasilkan cukup baik dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 merupakan hasil koordinasi yang baik antara semua stakeholder. Produktivitas dapat disimpulkan bahwa bentuk motivasi yang diberikan pimpinan kepada tim penyusun LPPD cukup baik dan maksimal.
2. Upaya yang dilakukan oleh bagian tata usaha pemerintahan sekretariat daerah untuk mewujudkan Efektivitas Koordinasi dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah adalah koordinasi dan transparansi dalam rangka terciptanya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang menjadi ukuran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang terbatas

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih belum mendapatkan kepuasan sepenuhnya pada penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait mekanisme penyusunan LPPD, tahapan-tahapannya serta lainnya yang dapat mengidentifikasi faktor lain yang menjadi penghambat dalam penyusunan LPPD selain koordinasi.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada staf bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Asisten Daerah 1, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah yang telah bersedia untuk meluangkan waktu serta berbagi wawasan dan informasi terkait penyusunan LPPD yang menjadi topik dalam penelitian ini.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA.

##### A. Buku-Buku

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.  
Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. CV. Mandar Maju.  
Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. ALFABETA.  
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. ALFABETA.

## B. Jurnal

- Aris Siswadi (2019). Evaluasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Skripsi. Universitas Terbuka
- Elip, H., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. Volume 6 N. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2011846>
- Henry Nelson Momuat, Jetty, E.H. Mokat, Fitri, H.M (2020) Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Jurnal Ilmu Politik. Universitas Samratulangi.
- Yodi, Dede. (2020). Efektivitas Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas Di Puskesmas Kecamatan Gambir. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*. 2(1) <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/JSDA/article/view/215>
- Simon, H. (2020). Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan. <https://repository.uir.ac.id/13882/>
- Moi, Veneranda. (2021). Determinasi Penghambat Kualitas Penyusunan Lppd Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Cendekia Jaya*. 3(2) <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/Cendekia-Jaya/Article/View/193>
- Nindy Syafrilia, Sri Widayanti. (2021). Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*. Vol.5
- Citra Ramadhani Ayu Nur Virdanti1, R. Widodo Triputro2. (2022). Analisa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. Vol 3

## C. Peraturan Perundang - undangan

- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah